

Urgensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Ekonomi Umat Di Indonesia : Studi Literatur

Muhammad Rajab Ardiansyah¹, Zuhri M. Nawawi²

¹FEBI UIN Sumatera Utara *muhammadrajab.ardiansyah@uinsu.ac.id

²FEBI UIN Sumatera Utara *zuhri.m.nawawi@uinsu.ac.id

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan implikasi dari beberapa faktor yang bersifat multi dimensi baik sosial-ekonomi, Salah satu solusi yang harus dihadirkan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah. Namun dalam perkembangannya, usaha kecil memiliki beberapa kendala terutama keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku maupun keterbatasan teknologi. Dari beberapa faktor tersebut yang menjadi faktor utama adalah mengenai keterbatasan modal. Lembaga keuangan mikro (LKM) berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk kredit mikro yang merupakan jasa finansial pada skala kecil yang diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan akses ke jasa perbankan tradisional, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana pembiayaan mikro. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan melakukan studi literatur dari 8 paper di google scholar yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sulit mendapat akses ke perbankan nasional. Dengan bantuan permodalan tersebut maka dapat menghidupi kelangsungan usaha masyarakat terkhusus yang berada di daerah pedesaan sehingga mampu untuk membuat pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci: Kemiskinan, Lembaga Keuangan Mikro, Pembangunan Ekonomi, Studi Literatur

Abstract

Poverty is still one of the main problems currently being faced by Indonesia. Poverty is an implication of several factors that are multi-dimensional both socio-economic. One of the solutions that the government must present in poverty alleviation is to encourage the development of small and medium enterprises. However, in its development, small businesses have had several obstacles, especially limited capital, marketing difficulties, limited human resources, raw material problems, and technological limitations. Of these several factors, the main factor is the limitation of means. Microfinance institutions (MFIs) function as financial institutions for microcredit, which are financial services on a small scale intended for people who have limited access to traditional banking services, to make it easier for the public to obtain microfinance funds. This research design uses a qualitative research approach by conducting a literature study of 8 papers on Google Scholar that are relevant to the research question. The results of this study indicate that microfinance institutions have an important role in maintaining the stability of the community's economy by providing capital assistance to small and medium enterprises that have difficulty getting access to national banking. With the help of this capital, it can support the continuity of community businesses, especially those in rural areas so that they can develop the people's economy.

Keywords: Economic Development, Literature Study, Microfinance Institutions, Poverty

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia pada saat ini. Kemiskinan merupakan implikasi dari beberapa faktor yang

bersifat multi dimensial baik sosial-ekonomi, budaya maupun politik¹. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa selama periode September 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10.19%, meningkat 0,41% jika dibandingkan dengan data pada bulan Maret 2020. Jumlah penduduk miskin per September 2020 yaitu sebesar 27,55 juta orang dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,13 juta orang terhadap data Maret 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh adanya pandemic covid-19 yang mengejutkan dunia.²

Negara-negara di dunia mulai menunjukkan keseriusan dalam mengatasi kemiskinan dinegaranya, bukti keseriusan itu ditandai dengan adanya kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs) pada September 2000 yang di adopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York. Implementasi MDGs di Indonesia mengalami keterlambatan yang sangat jauh sejak di lakukan pengesahan MDGs di tahun 2000. Mengenai keterlambatan ini pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan krisis 1998 yang pada saat itu Indonesia sedang berjuang melakukan pemulihan sehingga pada September 2015 melalui sidang umum PBB disepakati Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Salah satu solusi yang harus dihadirkan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah. Namun dalam perkembangannya, usaha kecil memiliki beberapa kendala terutama keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, keterbatasan sumber daya manusia, masalah bahan baku maupun keterbatasan teknologi. Dari beberapa faktor tersebut yang menjadi faktor utama adalah mengenai keterbatasan modal. Hal ini tentunya menjadi penghambat perkembangan usaha tersebut. salah satu solusi alternatif yang harus

¹ Layyinaturobanayah, Layyinaturobanayah. "Lembaga Keuangan Mikro dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang." *Sosiohumaniora* 21.2 (2019): 140-143.

² Awwalunnisa, Nur. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *IQTISHADUNA* 12.1 (2021): 29-47.

dilakukan adalah dengan memberikan pembiayaan untuk pendanaan usaha tersebut melalui Lembaga keuangan mikro (LKM). LKM berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk kredit mikro yang merupakan jasa finansial pada skala kecil yang diperuntukan bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan akses ke jasa perbankan tradisional, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan dana pembiayaan mikro. Program keuangan mikro sendiri telah terbukti dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan di Bangladesh, program yang dipelopori oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank. Dalam perkembangannya, LKM terbukti dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui meningkatkan pendapatan rumah tangga, dalam pembangunan ekonomi³

Pembahasan terkait Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia sudah dikaji oleh beberapa peneliti, antara lain seperti penelitian menunjukkan bahwa Lembaga keuangan mikro secara simultan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Secara parsial, lembaga keuangan mikro memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang, khususnya di 5 Kecamatan yaitu Cisit, Darmaraja, Wado, Jatigede dan Jatinunggal. Dengan ini pemberian pembiayaan usaha pada masyarakat oleh Lembaga keuangan mikro akan membantu menambah penghasilan keluarga. (Salam 2018) menjelaskan bahwa Lembaga keuangan mikro menjadi kebutuhan bagi masyarakat miskin. Dengan BUMDES potensi desa bisa tergali sehingga potensi desa tersebut bisa dijadikan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan desa beserta masyarakatnya dan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih jauh mengenai Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana urgensi dan peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat di Indonesia dalam Studi Literatur. Selanjutnya paper ini membahas urgensi dan peran apa saja yang bisa dilakukan Lembaga keuangan mikro dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun ekonomi umat di Indonesia.

³ Samer, Sayed, et al. "The impact of microfinance on poverty reduction: Empirical evidence from Malaysian perspective." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 195 (2015): 721-728.

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

1. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁴

2. Kegiatan Usaha LKM

- a. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- b. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Tujuan LKM:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah

4. Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM

- a. Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.

⁴ Masyithoh, Novita Dewi. "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5.2 (2014): 17-36.

- b. Permohonan izin usaha sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

5. Bentuk Badan Hukum LKM

- a. Koperasi; atau
- b. Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen).⁵

6. Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan sebagai gejala kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan dibawah garis kemiskinann jika pendapatan kelompok anggota masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal. Garis kemiskinan menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dapat di pengaruhi oleh tiga hal yaitu : 1) presepsi manusia terhadap kebutuhan yang diperlukan, 2) posisi manusia di dalam lingkungan sekitar, 3) kebutuhan objektif manusia untuk dapat hidup secara manusiawi. Ekonomi⁶

Masalah kemiskinan selalu menjadi topik diskusi baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Palsanya, kemiskinan dianggap sebagai awal dari semua lingkaran setan yang membuat perekonomian menjadi tidak inklusif akibat akses pertumbuhan yang tidak merata. Adapun kajian yang sesuai dengan tujuan penelitian terkait: Menurut Abdul Ghofur implementasi Islamic Microfinance sangat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam menyelesaikan kemiskinan. Sebagaimana menurut Erna dalam penelitiannya, usaha Islamic Microfinance telah dijadikan alat yang efektif dari tujuan mengentaskan kemiskinan, dengan cara meningkatkan mata pencaharian, kesejahteraan dan pembangunan ekonomi orang-

⁵ Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. "Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Law Reform* 15.2 (2019): 177-194.

⁶ Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf." *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 14.1 (2013): 151-166.

orang miskin⁷. Sesuai dengan pendapat Rashid dalam penelitiannya, bahwa tujuan utama untuk mencapai tujuan SDGs adalah sukses mengentaskan kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan melalui peran Islamic Microfinance. Sebagaimana pembuktian penelitian Samer, Mamun dkk di lembaga Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) salah satu lembaga islamic microfinance, menjelaskan program yang diterapkan pada lembaga Islamic Microfinance telah dapat memperbaiki situasi social dan ekonomi peminjam. Maka apabila disimpulkan dalam menghadapi tantangan kemiskinan pada saat ini, melalui peran Islamic microfinance dapat membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan terutama dengan meningkatkan aktifitas instrument keuangan social.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis konten. Setelah paper terkumpul selanjutnya dilakukan proses analisis isi melalui pendekatan Miles and Huberman yang terdiri dari pemilahan data, seleksi data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian dilakukan dengan menganalisis artikel terpilih yang membahas Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, untuk mengumpulkan data dilakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci “Peran Lembaga Keuangan mikro” dan “Pengentasan Kemiskinan” dan “Pembangunan Ekonomi Umat” dan “Indonesia” dengan menggunakan basis data Google Scholar pada tahun 2015-2022. Kedua, dilakukan analisis terhadap data artikel dengan menyesuaikan tema penelitian yaitu Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat di Indonesia. Tahap ketiga mengelompokkan artikel terkait penulis, fokus Urgensi dan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Umat.

⁷ Ahmad, Rusyda Afifah. "Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. 2020.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pencarian paper dengan kata kunci “Peran Lembaga Keuangan mikro” dan “Pengentasan Kemiskinan” dan “Pembangunan Ekonomi Umat” dan “Indonesia” pada kurun waktu 2018-2022 pada tanggal 1 Oktober 2022 ditemukan 743 paper di google scholar. Setelah itu diseleksi Kembali dengan hanya mengambil paper yang relevan dengan penelitian dan terdapat 30 paper. Setelah ditelaah secara manual kesesuaian naskah jurnal dengan pertanyaan penelitian serta paper yang dapat di akses ternyata hanya terdapat 8 artikel jurnal yang dapat dipilih.

No	Author	Title	Year
1	(Ahmad 2020)	Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan : Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial	2020
2	(Marino and Gunawan 2021)	Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya	2021
3	(Salam 2018)	Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES)	2018
4	(Husna, Puteri, and Winarno 2019)	Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Agam	2021
5	(Awwalunnisa 2021)	Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	2021
6	(Layyinaturrobaniyah 2019)	Lembaga Keuangan Mikro Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sumedang	2019
7	(Tidar 2021)	Peran Baitul Mall Wattamwil Sebagai Upaya	2021

8	(Samer et al. 2015)	The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective	2015
---	---------------------	--	------

Urgensi, Peran dan Strategi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan

Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk kelompok G-20. G-20 merupakan sebutan bagi perkumpulan ekonomi, baik negara maju maupun negara berkembang. Indonesia saat ini sedang berada pada kategori negara berkembang. Banyak masyarakat Indonesia masih berpenghasilan rendah yang menyebabkan mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kondisi yang sedemikian rumit tersebut maka diperlukan sebuah lembaga yang dapat menggandeng mereka untuk meningkatkan taraf hidup terutama dalam peningkatan kondisi perekonomiannya. Untuk itu, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang dapat hadir di tengah masyarakat untuk membantu menstabilkan kondisi perekonomian.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sarana dan program tersebut diantaranya dengan mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro di tingkat bawah seperti pedesaan.

Ahmad dalam penelitiannya tahun 2020 Menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro mampu berperan dalam stabilitas perekonomian masyarakat desa, dengan penduduk bermayoritas Islam dan bermata pencaharian petani telah bersemangat dalam meningkatkan sikap peduli antar saudara dan tetangganya. Dengan bukti mempertahankan dan mengembangkan program keuangan mikro Islam secara bertahap yang bersumber dari pembiayaan pertanian yang dikumpulkan sebagian masyarakat dan kemudian berkembang dengan program zakat pertanian dan program infaq. Dari ketiga instrumen keuangan sosial yang diterapkan memiliki keunikan yang menjadi ciri khas dari pembiayaan yang diterapkan. Adapun program keuangan mikro islam yang dijadikan alat dalam menyelesaikan kemiskinan adalah:

1. Pembiayaan gabah (sedekah jariyah) dengan akad qordhul hassan yang dipinjamkan saat musim paceklik dan masyarakat diharuskan membayar kembali saat datang musim panen dengan pembayaran gabah atau uang.
2. Pemberian beras melalui zakat pertanian saat musim paceklik diberikan kepada keluarga yang tidak mampu
3. Pembiayaan infaq dengan akad qordhul hassan yang diberikan bagi siapapun yang ingin meminjam dengan cara menghadiri pengajian setiap selasa malam dan pemberian infaq suka rela bagi masyarakat yang sangat mendesak membutuhkan.⁸

Marino dan Gunawan dalam penelitiannya tahun 2021 Menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro mampu berperan menjadi solusi terbaik dalam pengentasan kemiskinan lewat pemberdayaan perempuan.⁹ Layananan LKM berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan, semakin meningkat layananan LKM akan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Layanan LKM berpengaruh terhadap pemberdayaann merupakan dampak dari upaya pendampingan dan pelatihan atau lokakarya sehingga terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan, peningkatan daya tawar perempuan dalam rumah tangga yang merupakan cerminan kekuatan perempuan dalam berperan proses penentuan keputusan dalam rumah tangga yang merupakan salah satu indeks pemberdayaan perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berdaya perempuan dengan pengetahuan dan daya tawar yang lebih tinggi meningkatkan peranan perempuan dalam membantu peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga membantu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Salam dalam penelitiannya tahun 2018 Memaparkan dengan jelas bahwa lembaga keuangan mikro mempunyai urgensi ditengah masyarakat karena merupakan kebutuhan bagi masyarakat miskin terkhususnya masyarakat desa.¹⁰ Dimana lembaga keuangan mikro ini sudah menjadi kebutuhan dasar manusia dari lahir hingga masa tua. Dengan modal dan pendampingan, maka BUMDes LKMS merupakan jawaban dari

⁸ Ahmad, Rusyda Afifah. "Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. 2020.

⁹ San Marino, Wilman, and Gun Gun Gunawan. "Upaya pengentasan kemiskinan melalui layanan lembaga keuangan mikro dan program pemberdayaan perempuan di kecamatan rajapolah kabupaten tasikmalaya." *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen* 4.2 (2021): 121-132.

¹⁰ Salam, Annisa Nur, and Marwini Marwini. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10.2 (2018).

kebutuhan lembaga keuangan mikro desa tersebut. Dimana dalam operasionalnya, BUMDes LKMS ini menerapkan akad-akad syariah Islam yaitu wadiah, mudharabah dan musyarakah. Keempat, BUMDes LKMS dipandang mampu menjadi solusi bagi masyarakat miskin menuju masyarakat sejahtera. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran serta meminimalisir kemiskinan.

Awwalunnisa dalam penelitiannya tahun 2021 Menjelaskan strategi dalam pengentasan kemiskinan yaitu pemerintah harus serius dengan menggandeng lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan, begitu juga menggandeng lembaga keuangan syariah karena manfaat lain dari lembaga keuangan yaitu mempermudah transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Upaya dalam pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan dengan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari perbankan konvensional dan koperasi, namun juga melalui perbankan syariah.¹¹ Perbankan syariah dengan prinsip produknya yaitu bagi hasil yang dikenal sebagai pembiayaan mudharabah, pada dasarnya pembiayaan ini bersifat produktif karena diinvestasikan untuk penyediaan modal kerja sehingga dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kecil melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Dampak Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Umat

Dalam pembangunan ekonomi sangat diperlukan usaha-usaha kecil dan menengah yang dapat mendorong perekonomian. Namun sangat sering sekali timbul permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah, selain konsistensi dalam berwirausaha, masalah yang paling krusial adalah permasalahan keterbatasan modal. Untuk menjawab permasalahan keterbatasan modal serta dengan kemampuan fiskal pemerintah yang semakin berkurang, maka perlu lebih mengoptimalkan potensi lembaga keuangan yang dapat menjadi alternatif sumberdana bagi petani dan masyarakat pedesaan. Salah satu kelembagaan keuangan yang dapat dimanfaatkan dan didorong untuk membiayai kegiatan perekonomian di pedesaan yang mayoritas usaha penduduknya masuk dalam

¹¹ Awwalunnisa, Nur. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *IQTISHADUNA* 12.1 (2021): 29-47.

segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini sebetulnya telah banyak tumbuh dan mengakar dalam masyarakat pedesaan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Samer dkk dalam penelitiannya tahun 2015 Memaparkan bahwa keuangan mikro berdampak signifikan terhadap pencapaian kebijakan ekonomi baru (NEP) dan model ekonomi baru (NEM) yang memandu pencapaian visi Malaysia 2020 untuk menjadi negara yang sepenuhnya maju. Hal itu dilakukan, melalui peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terutama perempuan. Hal ini juga memainkan peran sentral dalam menciptakan lapangan kerja bagi perempuan terutama mereka yang berpendidikan rendah.¹² Oleh karena itu, keuangan mikro membuka peluang bagi peminjam perempuan untuk memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi.

Husna dkk dalam penelitiannya tahun 2019 Menjelaskan bahwa Penguatan budaya seperti keterlibatan tokoh adat atau agama dalam pembiayaan merupakan salah satu penentu sustainabilitas BMT.¹³ Hal ini dikarenakan BMT beroperasi di daerah dimana kondisi budaya dipengaruhi dan mempengaruhi olehnya. Dengan sustainabilitas BMT maka ini akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa yang mana masyarakat desa akan terus di beri asupan permodalan dalam melakukan usaha dan mengembangkan usaha mereka.

Layyinaturrobaniyah dalam penelitiannya tahun 2019 Memaparkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu alternatif pembiayaan bagi masyarakat miskin khususnya OTD sangat berdampak dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan untuk mendirikan usaha baru ataupun mengembangkan usaha yang telah berjalan.¹⁴ Dengan adanya usaha yang dijalankan oleh masyarakat, maka masyarakat dapat memperoleh penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat khu-

¹² Samer, Sayed, et al. "The impact of microfinance on poverty reduction: Empirical evidence from Malaysian perspective." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 195 (2015): 721-728.

¹³ Husna, Melya, Hesi Eka Puteri, and Winarno Winarno. "Determinan Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Agam." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 3.2 (2019): 61-74.

¹⁴ Layyinaturrobaniyah, Layyinaturrobaniyah. "Lembaga Keuangan Mikro dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang." *Sosiohumaniora* 21.2 (2019): 140-143.

susnya bagi para Orang Terkena Dampak (OTD) di daerah sekitar pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat.

Setyawan dkk dalam penelitiannya tahun 2021 Menjelaskan bahwa Lembaga keuangan mikro seperti BMT Bima mampu mengurangi kemiskinan melalui penyaluran dana ZISWAF (baitul maal) yaitu zakat, infak, shadaqah, dan wakaf kepada masyarakat yang membutuhkan di luar status sebagai nasabah.¹⁵ Namun yang kerap sekali menjadi masalah adalah Variabel pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa nasabah UMKM yang menggunakan pembiayaan untuk kegiatan perekonomian pribadi.

Penutup

Hasil dari penelitian studi literatur ini mengungkapkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro mempunyai urgensi ditengah masyarakat dan sangat berperan penting dalam penyedia permodalan untuk membuat usaha atau pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya asupan modal dari Lembaga keuangan mikro, maka masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah akan terbantu untuk mengembangkan usaha mereka dan menstabilkan perekonomian masyarakat. Dan tentu saja dalam pengentasan kemiskinan selain bantuan modal dari Lembaga keuangan mikro maka juga dibutuhkan pelatihan serta edukasi ke masyarakat agar bantuan modal dari Lembaga keuangan mikro tidak salah dalam penggunaannya, karena masih saja ada nasabah yang menggunakan bantuan modal dari Lembaga keuangan mikro untuk kebutuhan ekonomi pribadi sehingga terjadi kredit macet.

Lembaga keuangan mikro juga berdampak pada pembangunan ekonomi umat, yang mana dengan bantuan modal dari LKM, banyak pelaku usaha yang usahanya berkembang pesat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan mengurangi pengangguran. Ini menjadi bukti bahwa Lembaga keuangan mikro harus lebih banyak memberikan produk pembiayaan yang lebih inovatif agar selain memberikan permodalan LKM juga memberikan edukasi dan pelatihan agar lebih banyak terciptanya pelaku usaha baru dan tentu saja dengan banyaknya pelaku usaha

¹⁵ Setyawan, Supanji, and Chaidir Iswanaji. "Peran baitul mall wattamwil sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang* 9.2 (2021): 183-191.

baru maka akan banyak terbuka lapangan pekerjaan dan pengangguran berkurang secara signifikan.

Daftar Rujukan

- Ahmad, R. A. (2020, December). Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan: Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1, pp. SNPPM2020LPK-49).
- Ahmad, Rusyda Afifah. 2020. "Tantangan Dalam Pengentasan Kemiskinan : Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam Dan Keuangan Sosial." *Jurnak UNJ* 2020: 49–59.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *IQTISHADUNA*, 12(1), 29-47.
- Awwalunnisa, Nur. 2021. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Iqtishaduna* 12 (1): 29–47. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-keuangan-micro.aspx>
- Husna, Melya, Hesi Eka Puteri, and Winarno Winarno. 2019. "Determinan Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Agam." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 3 (2): 61. <https://doi.org/10.30983/es.v3i2.2556>.
- Layyinaturrobaniyah, Layyinaturrobaniyah. 2019. "Lembaga Keuangan Mikro Dan Pemberdayaan Perempuan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sumedang." *Sosiohumaniora* 21 (2): 140–43. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i2.19516>.
- Marino, Wilman San, and Gun Gun Gunawan. 2021. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro Dan Program Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen* 4 (2): 121. <https://doi.org/10.33603/jibm.v4i2.4222>.
- Masyithoh, N. D. (2014). Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan

- Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 17-36.
- Sakni, A. 2013. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf." *Jurnal Ilmu Agama* 14 (1): 151–66.
- Sakni, A. S. (2013). Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, 14(1), 151-166.
- Salam, Anisa Nur. 2018. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES)." *Az Zarka* ' 10 (5): 370–96.
- Samer, Sayed, Izaidin Majid, Syaiful Rizal, M.R. Muhamad, Sarah-Halim, and Nlizwa Rashid. 2015. "The Impact of Microfinance on Poverty Reduction: Empirical Evidence from Malaysian Perspective." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 195: 721–28. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.343>.
- Setyawan, S., & Iswanaji, C. (2021). Peran baitul mal wattamwil sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2), 183-191.